

**PENGARUH AUDIT OPERASIONAL DAN SISTEM PENGENDALIAN  
INTERN TERHADAP KINERJA BENDAHARAWAN BARANG PADA  
SATUANKERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) PEMERINTAH KOTA  
SABANG**

**SKRIPSI**

Karya Akhir Guna Memenuhi Sebahagian Dari Syarat-syarat Untuk Mencapai  
Gelar Sarjana Ekonomi

**OLEH**

**BUSRA NUR FADHIL  
NPM : 22100098  
PRODI AKUNTANSI**



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SABANG (STIES)  
BANDA ACEH  
2023**



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SABANG (STIES)**  
**BANDA ACEH**

**LEMBARAN PERSETUJUAN SKRIPSI**

Dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : Busra Nur Fadhil  
NPM : 22100098  
Judul Skripsi : Pengaruh Audit Operasional Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Bendaharawan Barang Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Sabang

Kami Pembimbing telah menyetujui Skripsi saudara tersebut di atas dan selanjutnya dapat diajukan kepada Panitia Komisi Ujian Komprehensif Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sabang (STIES) Banda Aceh.

Banda Aceh, 15 Agustus 2023  
Menyetujui,

Pembimbing I

Eliana, SE, M. Si  
NIDN. 1310047601

Pembimbing II

An.

Dr. M. Ridha Ramli, B.Acct, M.si, Ak, CA, CPA  
NIDN. 1327058001

**Ketua Prodi Akuntansi**

Intan Novia Astuti, SE, M.Si  
NIDN. 1321119301



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SABANG (STIES)**  
**BANDA ACEH**

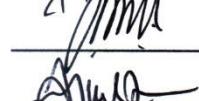
**PENGARUH AUDIT OPERASIONAL DAN SISTEM PENGENDALIAN  
INTERN TERHADAP KINERJA BENDAHARAWAN BARANG PADA  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) PEMERINTAH KOTA  
SABANG**

**Busra Nur Fadil**

NPM : 22100098  
Prodi : Akuntansi

Telah dipertahankan di depan Panitia Komisi Ujian Skripsi pada Tanggal 15 Agustus 2023 dinyatakan telah memenuhi syarat untuk disahkan.

Panitia Komisi Ujian

Eliana, SE, M.Si	Ketua	
Dr. M. Ridha Ramlili, B.Acct, M.si, Ak, CA, CPA	Sekretaris	
Ainul Ridha, SE, M.Si, Ak	Anggota	
Farah Ivana, SE, M.Si, Ak	Anggota	

Banda Aceh, 15 Agustus 2023  
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sabang (STIES)  
Banda Aceh

**Ketua,**



**Banta Karollah, SE, MSM**  
**NIDN. 0120056801**

## KATA PENGANTAR



Ungkapan rasa syukurku padaMu Ya Allah, Tuhan semesta alam, atas segala limpahan kasih sayang, nikmat Islam dan Iman di jalanMu sehingga skripsi yang berjudul **“Pengaruh Audit Operasional dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Bendaharawan Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Sabang”**. dapat terselesaikan dengan banyak kemudahan dan pertolongan. Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sabang (STIES) Banda Aceh.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini tidak luput dari bantuan, bimbingan dan dorongan dari semua pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sabang beserta seluruh Staf Pengajar yang telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan.
2. Ibu Eliana, SE, M.Si selaku pembimbing I dan Ibu Intan Novia Astuti SE, M.Si selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan memberikan bimbingan demi kesempurnaan skripsi ini.
3. Bendaharawan barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Sabang yang telah berkenan mengisi kuesioner.
4. Yang mulia Ayahanda dan Ibunda tercinta atas segala doa, semangat, ridho, kasih sayang yang selalu tercurah.
5. Buat keluarga besar di Kota Sabang yang telah memberi perhatian dan dukungan finansial selama penulis melaksanakan studi pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sabang Banda Aceh.

6. Buat sahabat-sahabat se angkatan yang telah banyak memberikan bantuan baik moril maupun materiil.

Demikianlah mudah-mudahan skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua, terutama kepada penulis sendiri. Namun penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dalam penyajian maupun dalam pembahasannya, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa akan membalasNya dikemudian hari. *Amin.*

Banda Aceh, Agustus 2023  
Penulis

**BUSRA NUR FADHIL**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	i
<b>DAFTAR ISI.....</b>	iii
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	v
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	vi
<b>ABSTRAK .....</b>	vii
 <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	1
1.1 Latar Belakang dan Permasalahan.....	1
1.2 Masalah Penelitian.....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	7
1.4 Manfaat Penelitian .....	7
1.5 Skop Penelitian .....	7
 <b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	8
2.1 Kinerja Bendaharawan .....	8
2.1.1 Pengertian Kinerja.....	8
2.1.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja .....	9
2.1.3 Indikator Penilaian Kinerja Bendaharawan .....	10
2.2 Audit Operasional .....	12
2.2.1 Pengertian Audit Operasional .....	12
2.2.2 Tujuan dan Manfaat Audit Operasional.....	14
2.2.3 Jenis-jenis Audit Operasional .....	15
2.2.4 Indikator Audit Operasional.....	16
2.3 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.....	16
2. 3.1 Pengertian Sistem Pengendalian Intern .....	16
2.3.2 Manfaat dan Tujuan Pengendalian Intern .....	18
2.3.3 Indikator Pengendalian Intern.....	19
2.4. Penelitian Sebelumnya.....	21
2.5. Kerangka Konseptual.....	21
2.6. Hipotesis .....	23
 <b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	25
3.1 Populasi dan Sampel .....	25
3.1.1 Populasi.....	25
3.1.2 Sampel.....	25
3.2 Metode Penarikan Sampel .....	26
3.3 Metode Pengumpulan Data.....	26
3.4 Operasional Variabel .....	27
3.5 Metode Analisis Data.....	28
3.6 Pengujian Data .....	29
3.7 Pengujian Hipotesis .....	30
 <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	31
4.1 Hasil Penelitian .....	31
4.1.1 Karakteristik Responden.....	32

4.2 Hasil Pengujian Instrumen.....	32
4.2.1 Hasil Uji Reliabilitas.....	32
4.2.2 Hasil Uji Validitas.....	33
4.3 Hasil Asumsi Klasik .....	35
4.3.1 Hasil Uji Normalitas .....	35
4.3.2 Hasil Uji Multikolinieritas .....	36
4.3.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas .....	37
4.4 Hasil Pengujian Hipotesis .....	38
4.4.1 Hasil Analisis Regresi.....	38
4.4.2 Koefisien Korelasi dan Determinasi .....	39
4.4.3 Pengujian Secara Simultan .....	40
4.4.4 Pengujian Secara Parsial .....	41
4.5 Pembahasan.....	43
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>45</b>
5.1 Kesimpulan .....	45
5.2 Saran-saran.....	45
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>47</b>

## **DAFTAR TABEL**

	<b>Halaman</b>
Tabel II.1. Hasil Penelitian Sebelumnya.....	21
Tabel III.1. Populasi dan Sampel Penelitian .....	25
Tabel III.2. Skala Pengukuran .....	27
Tabel III.3. Definisi dan Operasionalisasi Variabel.....	27
Tabel IV.1. Karakeristik Responden.....	31
Tabel IV.2. Hasil Uji Validitas .....	33
Tabel IV.3. Hasil Uji Reabilitas.....	34
Tabel IV.4. Hasil Uji Multikolinearitas .....	36
Tabel IV.5. Hasil Analisis Model Regresi Linier Berganda.....	38
Tabel IV.6. Hasil Analisis Korelasi dan Determinasi .....	40
Tabel IV.7. Hasil Uji F .....	41
Tabel IV.8. Hasil Uji t.....	42

## **DAFTAR GAMBAR**

	<b>Halaman</b>
Gambar II.1. Kerangka Pemikiran .....	23
Gambar IV.1. Grafik Uji Normalitas .....	37
Gambar IV.2. Scatterplot Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	37

## **ABSTRAK**

### **PENGARUH AUDIT OPERASIONAL DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN TERHADAP KINERJA BENDAHARAWAN BARANG PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) PEMERINTAH KOTA SABANG**

Nama : Busra Nur Fadhil  
NPM : 22100098  
Pembimbing 1 : Eliana, SE, M.Si  
Pembimbing 2 : Intan Novia Astuti SE, M.Si

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh audit operasional dan sistem pengendalian intern terhadap kinerja Bendaharawan Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Sabang baik secara parsial maupun simultan. Masalah yang timbul adalah kinerja bendaharawan di Kota Sabang masih menjadi masalah yang perlu ditingkatkan. Namun kinerja bendaharawan tersebut menjadi variabel yang multidimensi dengan berbagai faktor termasuk diantaranya adalah audit kinerja dan sistem pengendalian intern.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis kuantitatif dengan formulasi model regresi linier berganda. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian korelasional untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh antara variable bebas dan variable terikat. Adapun variabel bebas dalam penelitian ini berupa audit operasional dan sistem pengendalian intern. Sementara variabel terikat berupa kinerja bendaharawan.

Populasi penelitian ini adalah seluruh Bendaharawan barang pada SKPD di lingkungan pemerintah Kota Sabang yang berjumlah sebanyak 28 bendaharawan dari 28 SKPD. Penarikan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan metode teknik non probability sampel jenuh atau biasa disebut dengan sensus dimana seluruh populasi dijadikan sampel. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan dengan pembagian kuesioner. Teknik analisis data menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan .

Hasil penelitian menjelaskan audit operasional dan pengendalian intern secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kinerja Bendaharawan barang pada SKPD pemerintah Kota Sabang. Secara parsial kegiatan audit operasional berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja Bendaharawan barang pada SKPD pemerintah Kota Sabang. Secara parsial sistem pengendalian intern berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja Bendaharawan barang pada SKPD pemerintah Kota Sabang. Pemerintah Kota Sabang perlu mendorong kegiatan audit operasional secara lebih baik terutama dalam menetapkan standar tolok ukur untuk pelaksanaan pekerjaan. Pemerintah Kota Sabang juga perlu meningkatkan kualitas sistem pengendalian intern terutama mengenai penekisran resiko.

**Kata kunci:** audit operasional, sistem pengendalian intern, kinerja bendaharawan

## SURAT PERNYATAAN

Nam a : Busra Nur Fadhil  
NPM : 22100098  
Judul Skripsi : Pengaruh Audit Operasional Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Bendaharawan Barang Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Sabang

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi saya ini adalah asli dan benar-benar hasil karya sendiri, dan bukan hasil karya orang lain dengan mengatasnamakan saya, serta bukan hasil peniruan atau jiplakan (plagiarism) dari karya orang lain.
2. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar rujukan.
3. Pernyataan ini saya buat sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis skripsi ini, serta sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku di STIES Banda Aceh.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 15 Agustus 2023  
Yang membuat pernyataan,



Busra nur fadhil

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang dan Permasalahan**

Pengelolaan Barang Milik Daerah/Negara yang akuntabel, transparansi, efektif dan efisien merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah secara menyeluruh untuk mewujudkan tugas pemerintah daerah dalam pembangunan dan pelayanan publik. Diterbitkannya Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah kemudian di ikuti dengan hadirnya Permendagri No 47 Tahun 2021 tentang tata cara pelaksanaan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah sebagai pengganti dari Permendagri No 19 Tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang daerah serta telah membuat semakin besarnya tuntutan dan perhatian terhadap pengelolaan barang milik daerah.

Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah (Agus, 2019:2). Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang diatur dengan PP No.24 Tahun 2005, istilah barang disebut aset. Pengelolaan Barang Milik Daerah/Negara sebagaimana amanat Undang-Undang perlu dilaksanakan secara baik untuk memberi manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan umum. Untuk melaksanakan kegiatan tersebut maka pemerintah membutuhkan aparatur pengelolaan Barang Milik Daerah/Negara yang berkualitas sebagai bagian dari sistem pengelolaan anggaran daerah. Bendahara barang merupakan salah satu komponen penting dari sistem pengelolaan Barang Milik Daerah/Negara.

Bendahara merupakan setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara/daerah, menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara/daerah (Undang-undang Nomor 1 Tahun

2004 tentang Perbendaharaan Negara). Sementara bendaharawan barang adalah setiap orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menerima, menyimpan, menatausahakan, dan mempertanggung-jawabkan Barang Milik Daerah/Negara. Bendaharawan barang objek pengurusannya adalah barang (Tjandra, 2018:20). Bendaharawan barang menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 bertugas dalam menerima, menyimpan dan menyalurkan barang yang berada pada pengguna/kuasa pengguna; dan mengurus barang milik daerah dalam pemakaian pada masing-masing pengguna/kuasa pengguna.

Meningkatnya kegiatan pemerintahan daerah telah membuat sistem pengelolaan Barang Milik Daerah/Negara terus meningkat di Indonesia. Kondisi tersebut membuat kinerja bendaharawan barang semakin dibutuhkan oleh setiap SKPD untuk dapat melaksanakan kegiatan penatausahaan barang secara lebih efektif, lancar dan akuntabel di setiap daerah, serta dapat mendukung terlaksananya kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik. Kondisi tersebut telah menjadi tuntutan di seluruh jenjang pemerintahan di Indonesia termasuk di Kota Sabang.

Kota Sabang adalah salah satu perangkat daerah otonom di Provinsi Aceh yang melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik tersebut didukung oleh 28 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terdiri dari 12 Dinas, 8 Badan, 6 Kantor dan 2 Sekretariat (Sekretariat Daerah Kota Sabang, 2023). Untuk melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memiliki satu pejabat penyimpan dan pengurus barang yang di kenal dengan bendaharawan barang.

Bendaharawan barang pada SKPD di Kota Sabang bertugas menerima, menyimpan dan menyalurkan barang milik daerah, meneliti dan menghimpun dokumen pengadaan barang yang diterima, meneliti jumlah dan kualitas barang yang diterima sesuai dengan dokumen pengadaan serta mencatat barang milik daerah yang

diterima ke dalam buku/kartu barang. Namun tugas-tugas tersebut belum sepenuhnya dapat terselesaikan secara maksimal. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa kinerja Bendaharawan barang pada SKPD di Kota Sabang masih terdapat sisi lemah. Kondisi tersebut dapat dilihat dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mengungkapkan tata kelola aset di Kota Sabang perlu mendapat perhatian yang lebih serius karena masih terdapat aset – aset yang pencatatan dan legalitas yang kurang baik serta penilaiannya perlu *diupdate* (BPKP, 2020). Dengan demikian kinerja bendaharawan pada SKPD Pemerintah Kota Sabang masih menjadi masalah yang perlu ditingkatkan.

Kinerja bendaharawan adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap bendaharawan pada setiap instansi pemerintah sesuai dengan sasaran kerja dan perilaku kerja (Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2011). Kinerja bendaharawan tidak hanya dilihat secara kuantitas namun juga dari kualitas pekerjaan yang diselesaiannya. Dalam sektor publik khususnya sektor pemerintahan, kinerja dapat diartikan sebagai suatu prestasi yang dicapai oleh Pegawai Negeri Sipil termasuk bendaharawan (Stoner (1986) dalam Wahyuni dan Rosmida (2016). Namun kinerja bendaharawan barang menjadi variabel yang dipengaruhi banyak faktor termasuk audit kinerja dan sistem pengendalian intern.

Audit operasional merupakan bagian dari aktivitas pengawasan intern merupakan suatu pemeriksaan terhadap kegiatan operasi yang telah ditentukan oleh manajemen, untuk mengetahui apakah kegiatan operasi tersebut sudah dilakukan secara efektif, efisien, dan ekonomis. Pada umumnya definisi dari audit manajemen menekankan pada penilaian efektivitas, efisiensi dan ekonomisasi. Istilah audit manajemen juga sering digunakan bergantian dengan istilah audit operasional (Septianingrum, 2017). Audit operasional adalah pemeriksaan atas kegiatan dari fungsi-fungsi manajemen pemerintah daerah pada SKPD di Kota Sabang dalam aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas, dengan tujuan untuk memperbaiki kinerja dan

meningkatkan pertanggungjawaban. Audit operasional adalah pemeriksaan terhadap kegiatan organisasi, termasuk kebijakan akuntansi dan kebijakan operasional yang telah ditentukan manajemen sehingga diketahui apakah kegiatan operasional sudah dilakukan secara efektif, efisien, dan ekonomis (Agoes, 2017:173).

Berbeda dengan audit keuangan, di mana hasil audit keuangan adalah berupa pendapat (opini) auditor secara independen dan obyektif tentang kewajaran laporan keuangan sesuai dengan kriteria standar akuntansi yang ditetapkan tanpa pemberian rekomendasi perbaikan. Sedangkan dalam audit operasional, proses audit tidak hanya sekedar menyampaikan kesimpulan berdasarkan tahapan audit yang telah dilaksanakan akan tetapi dilengkapi dengan adanya rekomendasi untuk perbaikan di masa mendatang. Rekomendasi hasil pemeriksaan tersebut telah menjadi umpan balik untuk memperbaiki berbagai bentuk penyimpangan, hambatan dan kelemahan-kelemahan yang mungkin terjadi. Dengan demikian dengan adanya audit operasional maka kegiatan pembendaharaan barang milik daerah pada SKPD Kota Sabang dapat berjalan secara efektif sehingga penyimpangan dan kelemahan-kelemahan yang dihadapi bendaharawan barang akan dapat teratasi sehingga kinerja bendaharawan akan lebih baik. Audit Operasional berpengaruh terhadap kinerja bendaharawan (Manuaba dan Ketut, 2019).

Sebagaimana daerah-daerah lainnya bertambahnya jumlah barang milik daerah yang ditatausahakan oleh SKPD Kota Sabang sejalan dengan meningkatnya kegiatan pemerintah daerah di daerah ini cenderung menimbulkan berbagai bentuk kerawanan dalam pengelolaan barang daerah seperti penganggaran pengadaan barang yang tidak sesuai dengan kebutuhan, penggunaan barang milik daerah untuk kepentingan pribadi atau di luar tugas kedinasan, serta kurangnya evaluasi terhadap biaya-biaya yang akan menambah beban daerah atas harga perolehan aset tetap terutama biaya pemeliharaan. Penyimpangan tersebut akan berdampak buruk pada pertanggungjawaban keuangan

daerah pada SKPD di Kota Sabang. Untuk itu diperlukan auditor operasional untuk merevie penyimpangan, hambatan dan kelemahan sedini mungkin.

Kemudian sistem pengendalian intern juga menjadi salah satu faktor yang ikut mempengaruhi kinerja Bendaharawan Barang pada SKPD di Kota Sabang. Menurut Manuaba dan Ketut, (2019) sistem pengendalian intern menjadi salah satu faktor yang ikut mempengaruhi kinerja. Semakin baik sistem pengendalian intern maka akan ada kecendrungan kinerja yang semakin baik. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 Pasal 1 menyebutkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset daerah/ negara, dan ketataan terhadap peraturan perundang- undangan.

Sistem pengendalian intern pada pengelolaan barang pada SKPD Kota Sabang dapat terlihat dari adanya prosedur-prosedur dalam penerimaan dan pengeluaran barang, adanya prosedur dalam penggunaan barang, adanya pedoman pencatatan inventarisir barang, dan adanya sistem informasi dan telekomunikasi barang yang digunakan untuk pelaporan keuangan serta adanya komitmen yang kuat semua pegawai untuk menciptakan lingkungan pengendalian yang sehat dalam penggunaan barang. Kondisi tersebut akan ikut mempengaruhi terwujudnya kuantitas dan kualitas kerja bendaharawan barang. Sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kinerja bendaharawan (Manuaba, 2019).

Komponen-komponen dalam pengendalian internal seperti lingkungan pengendalian yang baik, akan memberikan kontribusi dalam menciptakan suasana kerja yang beretika sehingga dapat mendorong bendaharawan untuk selalu bekerja sesuai dengan peraturan yang berlaku. SKPD memiliki tingkat kewaspadaan yang

baik terhadap segala resiko penggunaan barang milik daerah/Negara yang akan didistribusi ke berbagai Bagian/Bidang Kerja sehingga bendaharawan akan dapat mengantisipasi dan mengatasi resiko-resiko yang mungkin terjadi. Kemudian informasi dan komunikasi akan memberikan dampak baik bagi peningkatan kinerja bendaharawan karena bendaharawan barang akan memperoleh dan dapat menukar informasi yang diperlukan dalam mengawasi penggunaan barang milik daerah. Aktivitas pengendalian akan mendorong bendaharawan untuk menaati dan melaksanakan peraturan dan standar kerja yang sudah ditetapkan. Pemantauan yang baik akan membuat bendaharawan barang untuk lebih disiplin dalam bekerja (Malinda dan Syamsir, 2019)

Berdasarkan uraian masalah sebelumnya, maka penulis tertarik untuk menganalisis secara ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul: **“Pengaruh Audit Operasional dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Bendaharawan Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Sabang”.**

## **1.2. Masalah Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang sebelumnya, maka dapat dirumuskan masalah penelitian adalah sebagai berikut:

1. Apakah audit operasional dan sistem pengendalian intern berpengaruh secara simultan terhadap kinerja Bendaharawan Barang pada SKPD Pemerintah Kota Sabang ?.
2. Apakah audit operasional berpengaruh terhadap kinerja Bendaharawan Barang pada SKPD Pemerintah Kota Sabang ?.
3. Apakah sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kinerja Bendaharawan Barang pada SKPD Pemerintah Kota Sabang ?.

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian rumusan masalah maka yang menjadi tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui apakah audit operasional dan sistem pengendalian intern berpengaruh secara simultan terhadap kinerja Bendaharawan Barang pada SKPD Pemerintah Kota Sabang.
2. Untuk mengetahui apakah audit operasional berpengaruh terhadap kinerja Bendaharawan Barang pada SKPD Pemerintah Kota Sabang.
3. Untuk mengetahui apakah sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kinerja Bendaharawan Barang pada SKPD Pemerintah Kota Sabang.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

- a. Memberikan informasi aktual bagi masyarakat ilmiah berkenaan dengan penelitian lanjutan dan pengembangan ilmu akuntansi sektor publik.
- b. Meningkatkan kompetensi mahasiswa.

#### **1.4.2. Manfaat Praktis**

- a. Memberikan suatu keputusan yang aktual bagi Bendaharawan Barang pada SKPD Pemerintah Kota Sabang dalam meningkatkan audit operasional, sistem pengendalian intern dan kinerja.
- b. Meningkatkan kemampuan aplikasi teori yang lebih baik bagi penulis.

### **1.5. Skop Penelitian**

Penelitian ini mengambil skop pada ilmu akuntansi publik untuk menganalisis pengaruh audit operasional dan sistem pengendalian intern terhadap kinerja bendaharawan dengan unit analisis adalah SKPD Pemerintah Kota Sabang

